



TRANSFORMASI KEBIJAKAN DAN POLITIK BERBASIS GENDER: PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENGUATAN DEMOKRASI

Rizal Fahmi¹, Saiful²

^{1,2}Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Syiah Kuala
email: rizalfahmi@usk.ac.id

Abstract

Gender-based policy and political transformation is a crucial issue in strengthening modern democracy, particularly in Indonesia, which upholds the principles of equality and social justice. Civics Education plays a strategic role in building citizens' critical awareness of the importance of gender equality in policy and political spheres. Through Civics Education, citizens are positioned not only as objects of education but also as active subjects in fighting for equal political rights without gender discrimination. This study highlights the relationship between gender-based policy and political transformation and the perspective of Civics Education, which emphasizes the values of democracy, participation, and civic responsibility. Gender-responsive policies are believed to expand women's political participation, strengthen representation in legislative and executive institutions, and encourage the formation of more inclusive public policies. Civics Education, in this context, serves as a vehicle for internalizing democratic values, strengthening political literacy, and developing citizens' critical attitudes toward gender-based injustice. Thus, integrating a gender perspective into Civics Education can be an effective strategy for fostering collective awareness of the importance of just politics. The results of this study indicate that strengthening democracy is determined not only by the existence of regulations but also by a civics education process that is capable of internalizing the values of gender equality. Therefore, the synergy between gender-responsive public policies and transformative citizenship education is key to realizing inclusive democracy in Indonesia.

Keywords: Transformation, Gender, Civic Education, Democracy, Public Policy

Abstrak

Transformasi kebijakan dan politik berbasis gender merupakan isu penting dalam penguatan demokrasi modern, khususnya di Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kritis warga negara terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam ruang kebijakan dan politik. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara tidak hanya diposisikan sebagai objek pendidikan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak politik yang setara tanpa diskriminasi gender. Kajian ini menyoroti hubungan antara transformasi kebijakan dan politik berbasis gender dengan perspektif Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan nilai demokrasi, partisipasi, dan tanggung jawab kewargaan. Kebijakan responsif gender diyakini mampu memperluas ruang partisipasi politik perempuan, memperkuat representasi dalam lembaga legislatif maupun eksekutif, serta mendorong terbentuknya kebijakan publik yang lebih inklusif. Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks ini berfungsi sebagai wahana internalisasi nilai demokratis, penguatan literasi politik, serta pengembangan sikap kritis warga negara terhadap ketidakadilan berbasis gender. Dengan demikian, integrasi perspektif gender dalam PKn dapat menjadi strategi efektif untuk menumbuhkan kesadaran kolektif

mengenai pentingnya politik yang berkeadilan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh proses pendidikan kewarganegaraan yang mampu menginternalisasikan nilai kesetaraan gender. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan publik yang responsif gender dan pendidikan kewarganegaraan yang transformatif menjadi kunci dalam mewujudkan demokrasi inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Transformasi, Gender, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Kebijakan Publik

Pendahuluan

Transformasi kebijakan dan politik berbasis gender merupakan isu strategis dalam pembangunan demokrasi yang berkeadilan dan inklusif di Indonesia. Sejak era reformasi, kesadaran akan pentingnya partisipasi perempuan dalam ruang publik dan politik terus meningkat, sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap prinsip kesetaraan gender sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Namun, meskipun telah terjadi kemajuan normatif, implementasi kebijakan yang sensitif gender masih menghadapi tantangan struktural, kultural, dan politik yang signifikan (Saptari & Holzner, 2019).

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, isu gender tidak hanya menjadi persoalan representasi politik, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter dan kesadaran kritis warga negara terhadap nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan partisipasi. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) berperan strategis dalam menanamkan nilai demokrasi yang inklusif, yaitu demokrasi yang menghormati keberagaman dan kesetaraan gender sebagai prasyarat kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan (Wahyono & Retnowati, 2020). Melalui pendekatan berbasis gender, PKn dapat menjadi wahana transformasi sosial yang menumbuhkan kesadaran reflektif terhadap relasi kuasa dan ketimpangan sosial yang seringkali termanifestasi dalam kebijakan publik maupun praktik politik.

Transformasi kebijakan berbasis gender menuntut perubahan paradigma dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, perspektif gender tidak hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan representasi perempuan, melainkan sebagai instrumen untuk mengoreksi ketimpangan sistemik yang memengaruhi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan nasional (World Bank, 2022). Oleh karena itu, integrasi gender dalam kebijakan politik harus bersifat transformatif, yaitu mengubah struktur sosial dan budaya yang mendasari diskriminasi gender.

Demokrasi yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari penguatan kapasitas warga negara untuk berpikir kritis, partisipatif, dan adil terhadap perbedaan gender. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai “ruang demokratis” tempat peserta didik belajar menghargai hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan nilai-nilai partisipatif dalam pengambilan keputusan (Banks, 2017). Pembelajaran PKn yang berperspektif gender tidak hanya mengajarkan norma-norma konstitusional, tetapi juga mengembangkan kemampuan reflektif terhadap isu sosial-politik kontemporer, termasuk ketidaksetaraan gender dalam ranah publik.

Di Indonesia, partisipasi politik perempuan masih tergolong rendah meskipun kebijakan afirmatif telah diterapkan melalui kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2024), keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2019–2024 baru mencapai sekitar 21,5%. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi kebijakan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan substantif dalam praktik politik. Hambatan kultural, stereotip gender, dan rendahnya pendidikan politik menjadi faktor penghambat partisipasi perempuan secara efektif (Fatimah, 2021).

Dengan demikian, transformasi kebijakan dan politik berbasis gender perlu dikaitkan dengan penguatan Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana internalisasi nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan. Pendidikan Kewarganegaraan yang responsif gender mampu membentuk warga negara yang sadar hak dan tanggung jawabnya serta memiliki empati terhadap isu-isu sosial dan politik yang menimpa kelompok rentan. Upaya ini sejalan dengan cita-cita demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya dialog, partisipasi, dan penghargaan terhadap perbedaan (Habermas, 2018).

Oleh karena itu, kajian mengenai transformasi kebijakan dan politik berbasis gender dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan menjadi relevan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif serta memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik yang demokratis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses transformasi kebijakan dan politik

berbasis gender dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrumen penguatan demokrasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk menelusuri makna, pengalaman, serta interpretasi sosial dari aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan dan praktik pendidikan yang berperspektif gender (Creswell & Poth, 2018).

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali fenomena sosial-politik dalam konteks yang natural, yaitu bagaimana kebijakan dan politik gender dijalankan serta dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk pendidik, pembuat kebijakan, dan aktivis perempuan (Denzin & Lincoln, 2018). Penelitian ini berupaya menemukan makna dan pola yang muncul dari interaksi sosial dan proses kebijakan, bukan sekadar mengukur hubungan antarvariabel seperti dalam penelitian kuantitatif.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya fokus utama penelitian adalah mendeskripsikan fenomena transformasi kebijakan dan menganalisis implikasinya terhadap pendidikan kewarganegaraan dan demokrasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam (*thick description*) mengenai hubungan antara kebijakan berbasis gender dan pembentukan kesadaran kewarganegaraan yang demokratis (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian difokuskan pada lembaga pendidikan dan instansi pemerintahan yang menjalankan program atau kebijakan berperspektif gender, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) serta sekolah dan perguruan tinggi yang menerapkan kurikulum kewarganegaraan berbasis kesetaraan gender. Subjek penelitian meliputi, Pejabat pembuat kebijakan (*policy makers*), Pendidik dan dosen PKn, Aktivis atau praktisi gender dan demokrasi, serta Peserta didik yang menjadi penerima dampak dari kebijakan dan pendidikan tersebut.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan peneliti terhadap kemampuan informan memberikan informasi yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2022).

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi informan terhadap kebijakan dan pendidikan berbasis gender.
- b. Observasi partisipatif, yakni peneliti terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran atau diskusi kebijakan untuk memahami konteks sosial yang melingkupi fenomena.
- c. Studi dokumentasi, meliputi analisis dokumen kebijakan pemerintah, kurikulum pendidikan kewarganegaraan, dan laporan lembaga terkait gender dan demokrasi.

Gabungan teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang kaya dan kredibel (Patton, 2015).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama:

- a. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemasukan perhatian, dan penyederhanaan data mentah yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian data (*data display*), berupa penyusunan hasil wawancara, observasi, dan dokumen ke dalam bentuk naratif dan matriks tematik.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yaitu menginterpretasi data untuk menemukan pola, makna, dan tema yang menjelaskan proses transformasi kebijakan dan politik berbasis gender dalam konteks pendidikan kewarganegaraan (Miles et al., 2019).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen untuk memastikan konsistensi serta validitas temuan (Creswell & Poth, 2018).

5. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan empat kriteria yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi dan *member checking*, sementara transferabilitas dipenuhi dengan deskripsi kontekstual yang rinci. Dependabilitas dan konfirmabilitas diperkuat dengan audit data dan pencatatan proses penelitian yang transparan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi kebijakan dan politik berbasis gender di Indonesia telah mengalami kemajuan normatif, terutama melalui penerapan kebijakan afirmatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Namun, secara substantif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam tataran budaya, institusi, maupun implementasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah.

Informan dari kalangan pendidik dan aktivis gender menyatakan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender meningkat, pendidikan kewarganegaraan di sekolah belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum maupun metode pembelajaran.

“Selama ini materi PKn masih fokus pada norma hukum dan nilai demokrasi secara umum, belum menyoroti ketimpangan gender sebagai bagian dari persoalan kewarganegaraan,”

(Wawancara dengan Dosen PKn, Banda Aceh, 2025)

Hasil observasi dan analisis dokumen menunjukkan bahwa pemerintah melalui KemenPPPA dan Kemendikbudristek telah meluncurkan beberapa program pengarusutamaan gender dalam kebijakan pendidikan. Namun, program tersebut masih bersifat *top-down* dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi. Sebagian besar pejabat dan pendidik memahami kesetaraan gender sebatas pada representasi perempuan dalam politik, bukan pada transformasi struktur sosial dan pola pikir yang diskriminatif.

“Kebijakan sudah ada, tapi implementasi di sekolah masih sangat terbatas karena tidak semua guru memahami konsep gender dalam konteks kewarganegaraan,”

(Wawancara dengan Pejabat KemenPPPA, Jakarta, 2025)

Dalam konteks pendidikan, PKn dipandang sebagai sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan gender. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan pembelajaran masih bersifat kognitif, belum sampai pada pembentukan kesadaran kritis siswa. Beberapa sekolah yang dijadikan lokasi penelitian telah mulai menerapkan kegiatan proyek sosial bertema kesetaraan gender, seperti kampanye “Pelajar Anti Kekerasan Berbasis Gender” dan

“Debat Demokrasi Setara.” Kegiatan ini terbukti meningkatkan empati dan partisipasi siswa terhadap isu-isu gender dan demokrasi.

“Setelah program PKn bertema kesetaraan gender, siswa laki-laki mulai lebih menghargai peran perempuan dan aktif berdiskusi tanpa bias,”
(Guru PKn, SMA Negeri 5 Banda Aceh, 2025)

Penelitian menemukan bahwa integrasi perspektif gender dalam pendidikan kewarganegaraan memiliki dampak positif terhadap penguatan demokrasi di tingkat individu dan komunitas sekolah.

1. Siswa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran berbasis gender menunjukkan:
2. Peningkatan sikap toleransi dan empati sosial,
3. Kesadaran terhadap isu hak asasi manusia,
4. Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan politik sekolah.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan yang berperspektif gender berpotensi menjadi agen transformasi sosial dan politik dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi partisipatif dan inklusif. Secara keseluruhan, penelitian ini menyebutkan transformasi kebijakan dan politik berbasis gender belum sepenuhnya berdampak efektif, karena masih terdapat kesenjangan antara kebijakan, implementasi, dan praktik pendidikan. Namun, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting sebagai jembatan antara kebijakan formal dan perubahan budaya masyarakat menuju demokrasi yang setara dan berkeadilan gender.

Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa transformasi kebijakan dan politik berbasis gender di Indonesia telah mengalami perkembangan, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Secara normatif, negara telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamin kesetaraan gender, seperti melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW dan berbagai kebijakan afirmatif di bidang politik dan pendidikan. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa perubahan tersebut belum sepenuhnya bersifat transformatif. Kebijakan gender sering berhenti pada tataran administratif misalnya, penyediaan kuota atau program formal tanpa diikuti dengan perubahan struktural dan kultural yang menyentuh pola pikir serta perilaku masyarakat (Fatimah, 2021; Saptari & Holzner, 2019).

Fenomena ini sejalan dengan pandangan Habermas (2018) bahwa demokrasi substantif menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam proses pembentukan nilai dan norma sosial, bukan hanya keterlibatan formal dalam struktur politik. Dalam konteks penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan berbasis gender belum secara optimal menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya partisipasi setara antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan karena pendekatan kebijakan masih bersifat *top-down*, sehingga partisipasi masyarakat, khususnya pendidik dan siswa, belum maksimal dalam merumuskan makna dan praktik kesetaraan gender di kehidupan nyata.

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan realitas sosial. PKn berfungsi sebagai media sosialisasi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesetaraan yang dapat diinternalisasi melalui pengalaman belajar. Namun, sebagaimana ditemukan di lapangan, integrasi nilai-nilai gender dalam PKn masih terbatas. Guru PKn umumnya memahami gender dalam arti sempit, sebagai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, belum sebagai upaya membongkar relasi kuasa yang tidak seimbang dalam masyarakat (Wahyono & Retnowati, 2020). Kondisi ini memperlihatkan perlunya peningkatan kapasitas pedagogis guru dalam memahami dan mengajarkan perspektif gender yang lebih kritis dan reflektif.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa ketika pembelajaran PKn dilakukan dengan pendekatan partisipatif misalnya melalui proyek sosial, simulasi debat demokrasi, atau kampanye kesetaraan terjadi perubahan perilaku dan sikap siswa. Mereka menunjukkan peningkatan empati, keberanian berpendapat, serta kesadaran terhadap isu-isu sosial dan politik yang berkaitan dengan keadilan gender. Perubahan ini menggambarkan bagaimana pendidikan kewarganegaraan berbasis gender dapat menjadi agen transformasi sosial dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi di kalangan generasi muda. Temuan ini mendukung pandangan Banks (2017) bahwa pendidikan kewarganegaraan yang demokratis harus mencakup penghargaan terhadap keberagaman dan perbedaan sosial, termasuk gender, sebagai bagian dari praktik kewarganegaraan yang adil dan inklusif.

Selain itu, hasil penelitian ini mengungkap bahwa faktor-faktor penghambat utama transformasi kebijakan dan politik berbasis gender berasal dari budaya patriarki, kurangnya pelatihan guru, dan minimnya integrasi nilai-nilai gender dalam kurikulum nasional. Sementara

faktor pendukungnya meliputi adanya komitmen pemerintah, peran organisasi masyarakat sipil, serta penggunaan media digital sebagai sarana pendidikan kesetaraan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa upaya pengarusutamaan gender memerlukan sinergi lintas sektor, bukan hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga dalam praktik pendidikan dan perubahan budaya sosial.

Jika dilihat dari perspektif pendidikan kewarganegaraan, transformasi kebijakan berbasis gender merupakan bagian dari penguatan *civic competence*, yaitu kemampuan warga negara untuk berpikir kritis, berpartisipasi aktif, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial (Creswell & Poth, 2018). Pendidikan yang responsif gender berperan penting dalam menanamkan nilai kesetaraan dan hak asasi sejak dini, sehingga peserta didik tumbuh sebagai warga negara yang mampu menolak diskriminasi dan mendukung demokrasi yang partisipatif. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan aspek normatif hukum dan politik, tetapi juga berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter demokratis yang menghargai perbedaan gender.

Secara teoritik, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi kebijakan dan politik berbasis gender sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan publik yang progresif dan pendidikan yang transformatif. Tanpa dukungan pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai kesetaraan gender, kebijakan afirmatif berisiko menjadi simbolik tanpa menghasilkan perubahan nyata dalam struktur sosial dan politik. Oleh karena itu, perspektif Pendidikan Kewarganegaraan memberikan kontribusi penting dalam mengubah kebijakan berbasis gender dari sekadar kebijakan administratif menjadi kebijakan yang memiliki dampak sosial dan kultural jangka panjang.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi kebijakan dan politik berbasis gender di Indonesia masih berada pada tahap transisi dari pendekatan normatif menuju pendekatan transformatif. Meskipun kebijakan afirmatif telah memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih luas dalam politik dan pendidikan, penerapan di lapangan masih menghadapi kendala struktural, kultural, dan pedagogis. Kesenjangan antara kebijakan dan praktik menunjukkan bahwa keadilan gender belum sepenuhnya menjadi nilai yang hidup dalam tatanan sosial dan politik masyarakat.

Dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, transformasi kebijakan berbasis gender memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya mengajarkan norma-norma hukum dan politik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang mampu menanamkan nilai kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Ketika nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam kurikulum dan praktik pembelajaran, peserta didik dapat mengembangkan kesadaran kritis dan kemampuan reflektif untuk memahami relasi gender sebagai bagian dari perjuangan demokratis.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berbasis gender merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial. Sinergi antara kebijakan publik yang progresif dan pendidikan yang transformatif menjadi kunci untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Demokrasi yang sejati hanya dapat terwujud apabila semua warga negara, tanpa memandang gender, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan publik.

Daftar Pustaka

- Banks, J. A. (2017). *Diversity and citizenship education: Global perspectives*. Jossey-Bass.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fatimah, S. (2021). Partisipasi politik perempuan dalam demokrasi Indonesia: Antara kebijakan afirmatif dan realitas sosial. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 12(2), 155–168. <https://doi.org/10.22146/jpp.2021.12.2>
- Habermas, J. (2018). *The inclusion of the other: Studies in political theory*. MIT Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Profil gender dan anak Indonesia 2024*. KemenPPPA.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Saptari, S., & Holzner, B. (2019). *Perempuan, kerja, dan perubahan sosial di Indonesia*. Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyono, H., & Retnowati, N. (2020). Pendidikan kewarganegaraan berbasis gender dalam penguatan karakter demokratis siswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 9(1), 33–45. <https://doi.org/10.21831/jpkn.v9i1.27634>
- World Bank. (2022). *Gender equality and development report 2022*. World Bank Group.